

Kiprah SBY



Susilo Bambang Yudhoyono

Menghapus Anggapan Presiden Persepsi

PEMILIHAN Umum (Pemilu) 2004 disebut-sebut membawa angin segar perubahan di Indonesia. Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden pertama pilihan rakyat menjadi satu bukti atmosfer demokrasi di Indonesia mulai terbuka di alam reformasi. Terpilihnya jenderal kelahiran Pacitan, Jawa Timur, ini tidak lepas dari kepopulerannya di mata rakyat sejak mencalonkan diri sebagai kandidat presiden.

Penyingkatan namanya menjadi SBY (baca: es-be-ye), membuatnya semakin mudah diingat orang. Bahkan, singkatan namanya ini disebut-sebut sebagai salah satu faktor kepopulerannya. Begitu juga dengan perjalanan politiknya semasa pemerintahan Megawati, saat dirinya mundur dari jabatan menteri koordinator politik dan keamanan (menko polkam) pada 11 Maret 2004, dianggap sebagai faktor utama ketenarannya di mata rakyat.

"Tantangan saya sebagai presiden berat. Karena itu, jawabannya, saya dengan ikhlas akan bekerja keras. Bekerja sebaik-baiknya," begitu kata Presiden SBY dalam wawancara dengan SINDO, awal tahun ini.

Salah satu tantangan berat yang dimaksud SBY adalah korupsi yang sudah menjadi bahaya laten di Indonesia. Bagaimana tidak, perkembangan praktik korupsi dari masa ke masa semakin meningkat, baik dari jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis. Berdasarkan laporan Transparency International, Indonesia selalu berada dalam peringkat 10 besar negara terkorup di dunia.

"Kita harus menghapuskan korupsi secara struktural dan budaya. Saya memerintahkan polisi dan jaksa agung agar setiap kasus korupsi yang ditangguhkan dimulai lagi. Kantor saya sendiri dan wakil presiden, para menteri dan gubernur, perlu dilihat sebagai kantor yang bersih dan bebas korupsi. Saya meminta langkah yang sama dilakukan di setiap tingkat pemerintahan provinsi. Saya juga telah meminta jaksa agung untuk mengambil tindakan hukum pada setiap bank yang tidak sehat atau memiliki indikasi korupsi, siapa pun yang berada di belakang mereka," tutur lulusan terbaik Seskoad 1989 yang dijuluki Jenderal Pemikir itu.

Langkah SBY yang menciptakan *shock therapy* bagi para koruptor, setidaknya membawa harapan baru di mata rakyat bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya sangat serius memberantas korupsi. Status sebagai salah satu negara terkorup di dunia membuatnya miris. Korupsi bukan lagi dikategorikan sebagai kejahatan biasa, tapi telah menjadi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Jadi, perlu cara luar biasa (*extraordinary*) pula untuk menanganinya.

Dalam pidato pelantikan, SBY menegaskan program utama kerja 100 harinya dimulai dengan gerakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sebagai langkah awal, pemberantasan KKN harus dimulai dari pejabat tertinggi.

SBY pun membidani sejumlah kebijakan terkait pemberantasan korupsi. Sebut saja Inpres No 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Lantas, membentuk Tim Pemburu Koruptor pada akhir 2004 dan Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) pada Mei 2005 lewat Keppres No 11 Tahun 2005.

Terhadap kinerja SBY dalam memberantas korupsi, 65% responden dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2005 menilai sudah bagus. Meskipun

masih mayoritas, angka itu menurun saat survei digelar pada Oktober 2006 menjadi 55%.

Niat dan kerja SBY dalam memberantas korupsi setidaknya masih menuai kritik. "Presiden yang harus memimpin sendiri gerakan antikorupsi dan jangan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi," jelas Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi.

Menurut Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita, pemberantasan korupsi mengalami bias arah. "Dikatakan oleh Presiden SBY bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari rumah sendiri (Setneg dan Setkab), akan tetapi kenyataannya yang diungkap masih juga kejadian masa lalu. Sekalipun kebijaksanaan tersebut tidak ada salahnya, akan tetapi seharusnya hal yang sama dilakukan terhadap peristiwa yang menyangkut rumah sendiri di masa kini," kata Romli.

Lepas dari soal korupsi, SBY menuai pujian pada langkahnya di bidang polkam, seperti keamanan,

politik, sosial, dan ekonomi dalam negeri, telah mendorong kita untuk lebih mengaktifkan peranan dalam percaturan politik kawasan dan global," tandas SBY.

Dia juga memperkenalkan konsep baru kebijakan luar negeri dalam istilah "konstruktivis", yang pada intinya dimaksudkan untuk mengembangkan tiga macam kondisi dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia. *Pertama*, pola pikir positif dalam mengelola kerumitan permasalahan luar negeri. *Kedua*, konektivitas yang sehat dalam urusan-urusan internasional. *Ketiga*, identitas internasional solid bagi Indonesia yang didasarkan pada pencapaian-pencapaian domestik dan diplomatiknya.

Wajar jika atas prestasinya ini, *polling* LSI menilai SBY belum memiliki pesaing yang cukup kuat di kancah perebutan posisi puncak perpolitikan negeri ini. Terlebih, selama ini partai-partai politik telah kehilangan figur kepemimpinan nasional. Rakyat

lumpur Lapindo.

Wakil Ketua DPD Laode Ida menilai, sebagai individu, popularitas SBY memang tidak bisa dimungkiri, tetapi sebagai presiden, status itu masih harus dipertanyakan. Menurut Laode, sejumlah kebijakan yang semestinya dilakukan di tingkat menteri tidak jalan. Dia menyebutkan contoh permasalahan beras dan masih minimnya penyerapan anggaran sektor kesehatan di sejumlah daerah di Indonesia.

Dua aspek, profesionalitas para menteri dan kredibilitas para kepala daerah, dipandang Laode sangat menentukan kesuksesan SBY. "Kalau ini tidak dilakukan, popularitas Presiden SBY sebagai individu maupun sistem pemerintahan akan hancur. Dan ke depan, rakyat akan meninggalkannya," tambahnya.

Soal kepemimpinan yang penuh ragu juga disampaikan oleh KH Hasyim Muzadi. "Mestinya, presiden tegas dan cepat dalam setiap mengambil kebijakan,"



SINDO/UPD

Pencitraan tanpa substansi tidak mungkin merebut simpati publik. Selain itu, kinerja baik tanpa pencitraan juga bakal menuai hasil yang kurang maksimal.

ketertiban, tertekannya kriminalitas, terorisme, separatisme, dan konflik komunal.

SBY pernah dipilih sebuah majalah ekonomi ternama Asia, *BusinessWeek* sebagai pemimpin paling berpengaruh di kawasan Asia. SBY disebut sebagai Indonesia Crisis Manager, khususnya dalam menangani bencana tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara.

Predikat itu melekat termasuk pada saat dia menyelesaikan konflik bersenjata antara Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Helsinki, Agustus 2005. Langkah SBY mengakhiri konflik bersenjata yang sudah berjalan lebih dari 30 tahun ini mengantarkannya sebagai nominator penerima Nobel Perdamaian 2006.

Dalam urusan politik luar negeri, SBY dinilai sukses mencitrakan Indonesia di mata dunia internasional. Setidaknya, dalam dua tahun terakhir arah politik luar negeri Indonesia telah kembali pada haluan politik bebas aktif. "Semakin mantapnya situasi

pun masih menaruh harapan besar lulusan terbaik Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 1973 yang berpenampilan tenang ini.

Kepopuleran SBY hingga kini memang belum terkalahkan. Hal itu dibuktikan kenyataan bahwa partai oposisi belum mampu menawarkan tokoh alternatif sebagai pesaing. "Ada kemandekan rekrutmen tokoh politik oleh parpol, itu yang membuat SBY berdiri tanpa penantang," kata Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani.

Kendati demikian, layakkah SBY disebut sukses dalam langkahnya?

Sekjen PDIP Pramono Anung menyebut SBY adalah model presiden persepsi. "SBY minimal menjadi presiden persepsi dan tidak ada tokoh saat ini yang melebihi SBY dalam hal citra," ujar Pramono.

Dia juga mengkritik kepemimpinan SBY yang dinilai penuh keraguan dalam setiap mengambil kebijakan. Menurut dia, beberapa kali momentum yang semestinya diputuskan cepat justru dilakukan dengan terlambat seperti dalam mengatasi musibah

tukasnya. Karena itu, dia mengingatkan presiden agar lebih responsif dan cepat dalam mengambil keputusan dalam menangani krisis multidimensional yang dihadapi bangsa ini. Terutama yang terkait dengan isu-isu kerakyatan, seperti penghapusan kemiskinan, jaminan pendidikan, dan kesehatan, serta pemberantasan korupsi.

Menanggapi anggapan sebagai presiden persepsi, Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng berpendapat, politik modern memang butuh pencitraan. Masyarakat tahu mana yang baik dan mana yang buruk. "Becik ketitik olo ketoro," katanya.

Andi menolak anggapan Pramono yang mengataakan keberhasilan SBY semata-mata karena politik pencitraan. Menurut Andi, pencitraan tanpa substansi tidak mungkin merebut simpati publik. Selain itu, kinerja baik tanpa pencitraan juga bakal menuai hasil yang kurang maksimal.

"Harus ada prestasi dan prestasi itu dicitrakan dengan baik," tandasnya. (*)

Politik



Eep Saefulloh Fatah

Dosen Eksekutif
The Indonesian School
of Democracy

Metamorfosis Yudhoyono

Saya pertama kali berkenalan dengannya di penghujung 1994. Saat itu, dia bertugas sebagai Kepala Staf Operasi Kasdam Jaya dengan pangkat kolonel. Ketika malam itu kami pertama kali berjumpa, dia memperkenalkan diri dengan menyebut lengkap namanya: Susilo Bambang Yudhoyono.

Yudhoyono mengundang saya mendiskusikan beberapa bab tentang politik tentara di buku pertama saya, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia* (1994). Dalam pertemuan—yang juga dihadiri empat rekan seangkatannya, termasuk Syamsul Maarif—kami tak hanya mendiskusikan soal-soal di seputar politik tentara, tapi juga soal-soal lain, semacam kapitalisme abad ke-21 yang kebetulan menjadi laporan utama *Newsweek* pekan itu.

Sejak itulah kami menjadi semacam teman diskusi tentang beragam soal. Sepanjang bertahun-tahun pertemanan, Yudhoyono terbukti memiliki kemauan, kemampuan, dan stamina diskusi di atas rata-rata. Yudhoyono bukan saja secara pasif selalu bersedia diajak diskusi, melainkan aktif mencari mitra diskusi. Banyak akademisi di Jakarta, Yogyakarta, dan Palembang (yang terlintasi perjalanan kariernya sebagai Kasops, Danrem, Kasdam, Pangdam, Kassospol, dan Kaster), yang menjadi kawan-kawan diskusinya, bisa bersaksi tentang ini.

Sejarah kemudian mencatat bahwa—sejak penghujung Orde Baru, 1990-an—Yudhoyono menjalani metamorfosis dengan melewati setidaknya tiga fase peranan. Dalam fase pertama, sebagai perwira menengah selepas menjadi pengajar Seskoad, dia mulai mengelola langsung politik tentara pada level kebijakan dengan menjadi Kasops hingga Kaster.

Ketika Yudhoyono tinggal selangkah lagi dari posisi yang diidam-idamkannya, yaitu Panglima TNI, Presiden Abdurrahman Wahid menarik

Yudhoyono meninggalkan fase pertama itu dengan "mensipilkannya" menjadi Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben, 1999). Mulailah Yudhoyono menjalani karier sebagai "pejabat publik yang tidak dipilih" (*non-elected public official*) berlatar belakang tentara hingga akhirnya terperangkap (atau memerangkap dirinya?) dalam konflik dengan presiden dan orang-orang di seputarnya pada penghujung pemerintahan Megawati.

Takdir, peruntungan, kesempatan, dan kerja keras akhirnya mengantarkan Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2004. Sebagaimana Presiden Nigeria Olesgun Obasanjo, Yudhoyono memasuki sepenuhnya dunia politik di tengah masa transisi yang tergelak dan kemudian memenangkan secara telak pemilu langsung presiden pertama dalam sejarah bangsanya. Dalam lebih dari dua tahun terakhir, Yudhoyono pun menjalani fase ketiga dalam metamorfosisnya, sebagai pejabat publik yang dipilih (*elected public official*).

Apa yang bisa kita catat dari metamorfosis itu? Menurut hemat saya, Yudhoyono termasuk yang bisa melewati fase pertama dengan relatif berhasil. Tetapi, dilihat dari pendekatan pemasaran, sukses Yudhoyono dalam fase ini, pertama-tama dan terutama, bukan karena hasil-hasil kerjanya yang sangat fenomenal, melainkan lantaran ketepatan dan kelayakan dalam memosisikan diri (*positioning*), menegaskan diferensiasi, dan kemudian membangun "merek".

Integritas, citra, dan identitas dirinya pun terbangun sebagai—apa yang disebut Morris Janowitz (*The Professional Soldier: A Social and Political Portrait*, 1960), sebagai—"intelektual tentara" (*military intellectual*). Meminjam penggambaran Janowitz, Yudhoyono—bersama sejumlah perwira lain, seperti (alm) Agus Wirahadikusumah dan Agus Widjono—"memandang dirinya

pertama-tama sebagai prajurit sambil percaya bahwa intelektualitas yang mereka miliki adalah bagian tak terpisahkan dari kelengkapan dirinya sebagai prajurit."

Kecenderungan sebagai intelektual tentara tentu saja merupakan modal, tetapi juga merupakan modal, tetapi juga terbukti bisa menjadi sumber persoalan. Catatan inilah yang layak diajukan manakala kita timbang metamorfosis Yudhoyono dari intelektual tentara ke "pejabat publik yang ditunjuk" dan kemudian "pejabat publik yang dipilih."

Penggunaan modal itulah yang terlihat tegas manakala Yudhoyono menjalani fase kedua, ketika menjadi Mentamben dan terutama Menko Polkam di bawah dua Presiden (Wahid dan Megawati). Kecenderungannya untuk berdiskusi, mengoptimalkan fungsi komunikasi, menyenangkan semua pihak, menempatkan perdebatan sebagai bagian dari proses pembuatan keputusan, adalah beberapa kecenderungan yang terus dipeliharanya.

Apakah Yudhoyono berhasil dalam fase ini? Kekhasan politik 1999–2004, menyulitkan kita menjawab pertanyaan ini secara benderang. Yang jelas, tidak tersedia waktu yang memadai untuk menilai sukses/gagal Yudhoyono sebagai Mentamben. Lalu, dalam posisi sebagai Menko Polkam, Yudhoyono praktis hanya leluasa menjalankan fungsi koordinasi dalam pemerintahan dengan kekuasaan politik yang serbatertabas.

Secara umum, periode 1999–2004, dengan dinamika politik yang lebih berpusat pada presiden dan wakil presiden serta kekhasan-kekhasan lainnya, membatasi kemungkinan Yudhoyono untuk membuktikan kemampuan manajerial, kepemimpinan, pemeliharaan dukungan politik, dan pengelolaan harapan publik secara sekaligus. Dalam fase ini, citra yang lebih terbangun adalah Yudhoyono yang

baik, bukan Yudhoyono yang kuat.

Fase ketigalah—sejak 2004—yang menjadi ujian sesungguhnya bagi Yudhoyono. Sebagai pejabat publik yang dipilih, dia mau tak mau dibebani harapan besar pemilih serta mesti berhadapan dengan para penagih janji. Tuntutan atasnya pun jauh lebih besar dan tinggi ketimbang yang diterimanya dalam dua fase sebelumnya. Pendeknya, dia diminta untuk menegakkan mandat dan membangun keterwakilan dengan merealisasikan janji-janji kampanyenya.

Lalu, setelah Yudhoyono memerintah selama lebih dari dua tahun, apa yang bisa kita catat di penghujung tahun ini? Apakah dia menunaikan tugasnya dengan baik? Apakah dia memegang teguh janji-janjinya?

Survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) sekitar dua bulan lampau, sepertinya menjawab pertanyaan itu dengan positif. Setidaknya, menurut survei itu, Yudhoyono berhasil menjaga kepuasan masyarakat. Penghargaan yang diberikan dari *polling* SINDO seolah memberi konfirmasi ulang untuk jawaban serupa.

Akan tetapi, izinkanlah saya tak sepenuhnya sepakat. Menurut saya, Yudhoyono terlampaui senang "berdiri di perbatasan". Dia berdiri di garis batas antara intelektualitas dan ketentaraan. Dia juga berdiri di garis batas antara kualitas pemimpin yang baik dan pemimpin yang kuat.

Jika Yudhoyono tak juga melangkah dari garis batas itu, dia potensial membikin kecewa mereka yang berharap pemerintahan berlaku "baik" (misalnya dengan mengelola kebijakan-kebijakan yang meneyejaterakan), sekaligus mengecewakan mereka yang menuntutnya membangun pemerintahan yang kuat. Banyak harapan pun potensial dibuatnya bertepuk sebelah tangan.

Wallahua 'lam bish-shawab. ()*



Popularitas Politik dan Puisi

*Rindunya hatiku padamu,
kekasih tambatan jiwa di seberang sana.
Bolehkah kutitipkan salam
lewat burung kenari yang terus
bernyanyi.
Sayang, aku kangen pada pelangi di
matamu,
dan kasih indah di dadamu.
Masihkah bersemi?*

DIBALIK penampilannya yang tenang, serta tutur kata santun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyimpan sebuah sikap melankolis. Ya, SBY adalah seorang melankolis. Tengok saja puisi berjudul *Kangen* di atas dalam sebuah antologi bertajuk "Taman Kehidupan" (Garden of Life) dan diluncurkan pada Maret 2004.

Puisi tersebut ditulisnya beberapa hari sebelum Hari Kasih Sayang (Valentine's Day) Februari 2004. Puisi ini menjadi pembuka bagi pembaca yang ingin menikmati 31 puisi karyanya dalam antologi itu. Kumpulan puisi tersebut dibuat dalam waktu relatif singkat, hanya sekitar dua bulan. Puisi *Kangen* juga dimuat dalam buku biografinya berjudul *Sang Demokrat*.

Sekumpulan karya puisi dalam "Taman Kehidupan" sebagai salah satu bentuk ekspresi berkebudayaan yang memang melekat dalam diri SBY sejak muda. Puisi-puisi itu juga merupakan tempaan jiwa sang Jenderal Pemikir ini, selain tempaan raga yang didapatnya selama menjalani karier militer.

Kangen, bukan satu-satunya puisi bernuansa cinta yang dia torehkan di atas kertas. Puisi berjudul *Mahligai Kasih* yang sarat nasihat dan cinta merupakan contoh lain ekspresi melankolis SBY yang dibuat di kediamannya di Cikeas, Bogor, 4 Februari 2004.

*Anak-anakku,
kau bangun mahligai cinta
di taman kehidupanmu yang teduh
hari ini
kembang kasih tengah mekar di
hatimu...*

*Perjalananmu panjang, anakku dan
tak miskin rintangan serta godaan.
Namun, layar telah kau
kembangkan.
Jangan surut dan tertinggal di
buritan.
Satukan jiwamu, jemput masa
depanmu,
di tanah kemenangan abadi
dalam keberkahan Tuhan*

Menariknya, karya puisi SBY berjudul *Menang* pernah dibacakan penyair kondang "Si Burung Merak" WS Rendra dalam acara penutupan Festival Ampel 2004 di halaman Masjid Al Akbar, Surabaya, Jawa Timur, 22 Juli 2004. Saat itu Rendra didampingi koleganya Setiawan Djody. SBY yang juga hadir dalam acara itu mengenakan baju muslim berwarna hitam masih berstatus calon presiden. SBY didampingi istrinya, Ani Yudhoyono, turut mengumandangkan salawat badar bersama Rendra, Djody dan penyanyi Trie Utami, sebelum pembacaan puisi.

SBY tidak semata-mata hanya fasih membuat puisi-puisi bernuansa cinta. Tidak jarang, dirinya mengekspresikan kegalauan hati melihat kondisi konflik di sejumlah wilayah di republik ini. Tapi, di balik kegelisahannya, tersimpan harapan, seperti puisi berjudul *Lorong Berujung* yang ditulisnya di Jakarta, 13 Februari 2004.

*Ada yang masih ku cari
karena tiba-tiba pergi. Harmoni.
Ada yang runtuh berserakan karena
dendam dan permusuhan.
Persahabatan
ada puing tragedi
retak jatuh di kali. Toleransi.*

*Harus kuberanikan diriku
untuk memberitakan kegelapan
zaman masa transisi...*

Kemampuan SBY bergelut di ranah seni merupakan gambaran sosok jenderal purnawirawan ini berjiwa universal. Langkah ini juga memengaruhi upayanya di kancah politik. Paling tidak, lagu *Pelangi di Matamu* milik grup musik Jamrud menjadi satu bukti kemampuan berkesenian SBY. Kemampuan inilah yang dijadikannya sebagai alat komunikasi politik pada masa kampanye pemilihan presiden.

GAYA dan tutur bicara yang tenang, sistematis, dan berwibawa, mengantarkannya sebagai sosok yang cukup populer di mata rakyat. Sejak terpilih sebagai Presiden Indonesia keenam pada 2004 lalu hingga kini, SBY selalu mendapat tempat terbaik dalam hati sebagian besar rakyat Indonesia. Terlebih di kalangan kaum hawa. Maklum, badan tegap ditambah tutur kata santun seringkali menjadi alasan bagi kaum hawa untuk mengidolokannya. SBY adalah sosok yang beruntung memiliki popularitas politik.

Tapi, dalam perjalanannya memimpin bangsa ini, bukan hanya popularitas yang menjadi andalan SBY. Suami dari Ani Yudhoyono ini juga dinilai sebagai sosok yang berperan memberikan pengaruh besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di bidang politik. Terbukti, lewat jajak pendapat SINDO bertajuk *People of The Year 2006*, SBY menempati urutan teratas dalam tokoh berpengaruh di ranah politik.

Menariknya, selain terkenal karena kiprahnya, SBY juga dilirik karena sosoknya yang karismatik, berwibawa, serta santun. Bahkan,

dari survei di lapangan, Rina, seorang ibu dari Medan mengaku kalau dirinya begitu mengidolakan SBY karena tampilan fisiknya yang gagah dan tampan. Yanthi dari Jakarta juga berpendapat sama. "Saya suka banget sama SBY. Dia ganteng dan berwibawa. Saking sukanya, saya selalu memimpikan dia masuk deretan mantan pacar saya dulu sebelum menikah" tutur wanita berusia 46 tahun ini.

Tidak hanya rakyat di luar Istana yang menilai SBY sebagai sosok populis, santun dan karismatik. Andi Alifian Mallarangeng, juru bicara presiden yang berada di lingkungan istana menilai sosok SBY adalah orang yang hangat. Meski sibuk, tuturnya, Presiden selalu menyempatkan diri berdiskusi tentang banyak hal. Tidak hanya dengan dirinya, tapi juga dengan para staf lainnya yang berusia lebih muda. Tak heran jika diskusi dan menganalisa suatu masalah menjadi salah satu kesenangan SBY.

Andi menilai, SBY juga sosok yang tenang ketika mendapatkan pujian atau kritik. SBY selalu menanggapi pujian dengan kepala dingin. "Karena itu, saya banyak belajar dari beliau bagaimana menghadapi pujian dan kritikan. Beliau berpikir terus, bekerja keras untuk menjalankan mandatnya, melindungi, melayani, dan meningkatkan taraf hidup rakyat," katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Syarif Hasan menilai, SBY sebagai sosok cerdas dalam mengambil keputusan. Segala sesuatunya dipertimbangkan secara matang. Terlebih jika terkait kebijakan politik yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat. "Sebagai pemimpin, kebijakan yang diambil itu kan berdampak besar. Jadi untuk mengambil keputusan, dia kerap mendiskusikannya dengan orang-orang di sekitar," ujar Syarif yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPR. (*)

